

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Andayani Dwi, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Negara, PT. Grafindo Persada: Jakarta, 2022

Aries Dian Mujiburohman, Pengantar Hukum Tata Negara, STPN Press: Sleman, 2017

Asshiddiqie Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta, 2016

Farida Maria Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan, PT. Kansius: Yogyakarta, 2020

Sudarsono, Kamus Hukum Edisi Baru, Jakarta : Rineka Cipta, 2007

Sudikno Mertokusumo, Penemuan hukum sebuah pengantar, Yogyakarta : Liberty, 2009

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984

Soemantri Sri M., Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pemandangan, PT. Remaja Rodajarta: Bandung, 2014

Tanzeh Ahmad, Pengantar Metode Penelitian, Teras: Yogyakarta, 2009

Santoso M. Agus, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk.Kedua, Jakarta: Kencana, 2014

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembe ntukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

C. Jurnal

Br. Sryani Ginting, Harmonisasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Medan: Program Studi Ilmu Hukum UPH Kampus Medan

Donald Henry Lbn Toruan, Implementasi Harmonisasi dan Sinkronisasi Pasca Terbentuknya Omnibus Law UU Cipta Kerja, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I

Fitryantica Agnes, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law, Jurnal Gema Keadilan